

RETHINKING POLITICS FROM CHINA THROUGH RELATIONALITY AND MORAL LEADERSHIP A CONCEPTUAL ANALYSIS

Muhammad Dhani¹; Sugiarto Pramono^{2*}

¹Mahasiswa Program Hubungan Internasional, Universitas Wahid Hasyim, Semarang;

²Hubungan Internasional, Universitas Wahid Hasyim,

Email: sugiartopramono@unwahas.ac.id

ABSTRACT

The dominance of Western theories in the study of International Relations (IR) has long shaped the ontological, epistemological, and normative assumptions of the discipline. With the rise of China as a global actor, intellectual efforts have emerged to develop IR theories grounded in China's historical experience and philosophical traditions. This article examines the conceptual foundations, historical development, and major contributions of Chinese International Relations theory to the enrichment of global IR theory. Focusing on Qin Yaqing's relational approach and Yan Xuetong's moral realism, the article demonstrates that Chinese IR theory offers a substantive critique of individualism, instrumental rationality, and material reductionism embedded in Western IR theories. By emphasizing social relations, morality, and ethical leadership, Chinese IR theory broadens prevailing understandings of power, legitimacy, and international order. Drawing on Amitav Acharya's Global IR framework and Hun Joon Kim's analysis of IR theory with Chinese characteristics, the article argues that the contribution of Chinese IR theory lies not in claims of cultural superiority, but in its capacity to enrich theoretical pluralism and to decolonize IR knowledge. It concludes that Chinese IR theory has the potential to become an integral component of Global IR, provided that it is developed in a critical, dialogical, and context-transcending manner.

Key Words: Chinese International Relations Theory; Relationality; Moral Realis; Global International Relations (Global IR); Non-Western IR Theory

ABSTRAK

Dominasi teori Barat dalam studi Hubungan Internasional (HI) telah lama membentuk asumsi ontologis, epistemologis, dan normatif disiplin ini. Seiring dengan kebangkitan China sebagai aktor global, muncul upaya intelektual untuk mengembangkan teori HI yang berakar pada pengalaman historis dan tradisi filsafat China. Artikel ini menganalisis fondasi konseptual, perkembangan historis, serta kontribusi utama teori HI China terhadap pengayaan teori HI global. Dengan menitikberatkan pada pendekatan relasional Qin Yaqing dan moral realism Yan Xuetong, artikel ini menunjukkan bahwa teori HI China menawarkan kritik substantif terhadap individualisme, rasionalitas instrumental, dan reduksionisme material dalam teori Barat. Melalui penekanan pada relasi sosial, moralitas, dan kepemimpinan etis, teori HI China memperluas cara memahami kekuasaan, legitimasi, dan tatanan internasional. Dengan menggunakan kerangka Global IR dari Amitav Acharya dan analisis Hun Joon Kim mengenai teori HI dengan karakteristik China, artikel ini berargumen

bahwa kontribusi teori HI China tidak terletak pada klaim superioritas budaya, melainkan pada kemampuannya memperkaya pluralisme teoretis dan mendekolonisasi pengetahuan HI. Artikel ini menyimpulkan bahwa teori HI China berpotensi menjadi bagian penting dari Global IR apabila dikembangkan secara kritis, dialogis, dan terbuka terhadap pengujian lintas konteks.

Kata Kunci: Teori Hubungan Internasional China; Relasionalitas; Realisme Moral; Hubungan Internasional Global (Global IR); Teori HI Non-Barat

PENDAHULUAN

Studi Hubungan Internasional (HI) selama beberapa dekade didominasi oleh perspektif Barat, khususnya yang berkembang di Amerika Serikat dan Eropa. Dominasi ini tidak hanya terlihat pada teori-teori arus utama, tetapi juga pada standar metodologis dan agenda riset global. Seiring dengan kebangkitan China sebagai kekuatan ekonomi dan politik dunia, muncul tuntutan intelektual untuk mengembangkan teori HI yang mampu menjelaskan perilaku, nilai, dan visi tatanan internasional China secara lebih otentik. Dalam konteks inilah teori HI China berkembang sebagai bagian dari gerakan non-Western International Relations theory.

Dominasi teori Barat dalam studi Hubungan Internasional (HI) telah lama membentuk cara pandang terhadap dinamika politik global. Realisme, liberalisme, dan konstruktivisme—yang berakar pada ontologi substantialis—cenderung memandang negara sebagai aktor otonom dengan kepentingan tetap, sehingga hubungan antarnegara dipahami terutama sebagai interaksi kepentingan material. Namun, perkembangan globalisasi, interdependensi, dan kompleksitas relasi transnasional menunjukkan keterbatasan pendekatan tersebut dalam menjelaskan realitas politik dunia kontemporer. Dalam konteks ini, muncul apa yang disebut sebagai relational turn dalam teori HI, yang menekankan relasi sosial sebagai unit analisis utama.

Meski mendapat perhatian luas, kajian mengenai relational turn masih didominasi perspektif Barat dan jarang dibandingkan secara sistematis dengan tradisi pemikiran non-Barat. Liu, Garlick, dan Qin (2022) menegaskan bahwa pendekatan relasional memiliki potensi besar untuk menjembatani filsafat Konfusian China dengan teori HI

Barat. Namun, mereka juga menunjukkan adanya hambatan teoritis dan kultural yang signifikan dalam merekonsiliasi versi relasional Barat dengan relasionalisme China, khususnya terkait perbedaan ontologis, epistemologis, dan konteks historis .

Perdebatan ini tidak terlepas dari persoalan yang lebih mendasar: absennya teori HI China yang mapan. Qin Yaqing (2007) berargumen bahwa ketiadaan teori HI China bukan disebabkan oleh kekosongan intelektual, melainkan oleh dominasi wacana Barat, lemahnya kesadaran “internasional” dalam pandangan dunia tradisional China, serta belum adanya inti teoretis yang konsisten dalam studi HI China. Meski demikian, Qin menegaskan bahwa kemunculan teori HI China bersifat niscaya, seiring transformasi sosial-ekonomi China dan penggalian ulang tradisi intelektual seperti Tianxia dan pengalaman historis sistem tributari.

Pandangan ini diperkuat oleh Song Xinning (2010), yang menyoroti berkembangnya generasi baru sarjana HI China yang semakin fokus pada pembangunan teori dengan “karakteristik China”. Meskipun menghadapi tantangan metodologis dan konseptual, upaya ini mencerminkan pergeseran dari sekadar adopsi teori Barat menuju produksi pengetahuan teoretis yang lebih otonom. Dengan demikian, teori HI China—khususnya pendekatan relasional—tidak hanya relevan bagi pemahaman kebijakan luar negeri China, tetapi juga berkontribusi pada pluralisme dan pengayaan teori HI global .

Artikel ini bertujuan menjawab dua pertanyaan utama: (1) apa fondasi konseptual dan filosofis teori HI China, dan (2) sejauh mana teori ini berkontribusi terhadap pengayaan teori HI global. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya memotret teori HI China sebagai wacana akademik domestik, tetapi juga sebagai proyek intelektual global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretatif yang berbasis pada analisis teoretis dan konseptual. Penelitian ini didasarkan pada telaah kritis terhadap teks-teks utama dan karya-karya akademik kunci

mengenai teori Hubungan Internasional (HI) China, dengan perhatian khusus pada teori relasional, realisme moral, dan perdebatan seputar konsep Tianxia. Melalui analisis literatur yang sistematis, artikel ini menelusuri perkembangan historis, fondasi filosofis, serta argumen utama dalam tradisi teori HI China. Pendekatan teoretis komparatif digunakan untuk mengkaji bagaimana teori HI China berinteraksi dengan, mengkritik, dan memperluas paradigma HI arus utama Barat, termasuk realisme, liberalisme, dan konstruktivisme. Analisis ini kemudian ditempatkan dalam kerangka Global IR untuk menilai implikasi disipliner yang lebih luas dari teori HI China terhadap pluralisme teoretis dan produksi pengetahuan. Alih-alih menguji hipotesis secara empiris, studi ini bertujuan memperjelas konsep, mengevaluasi klaim normatif dan ontologis, serta menilai potensi kontribusi dan keterbatasan teori HI China dalam memperkaya kajian Hubungan Internasional global..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Intelektual Teori Hubungan Internasional China

Sejarah intelektual teori Hubungan Internasional (HI) di China tidak dapat dilepaskan dari pengalaman historis panjang China dalam berinteraksi dengan dunia luar serta transformasi besar yang dialaminya sejak abad ke-19. Berbeda dengan tradisi Barat yang melahirkan teori HI seiring perkembangan negara-bangsa dan sistem Westphalia, pemikiran politik luar negeri China pra-modern berakar pada kosmologi dan tatanan normatif seperti Tianxia dan sistem tributari, yang tidak memisahkan secara tegas antara politik domestik dan internasional. Akibatnya, hingga awal abad ke-20, China tidak mengembangkan teori HI dalam pengertian modern, melainkan seperangkat pandangan normatif mengenai tatanan dunia yang bersifat hierarkis dan moral.

Kekalahan China dalam Perang Candu dan masuknya kekuatan Barat ke Asia Timur menjadi titik balik penting. Sejak periode ini, China dipaksa beradaptasi dengan sistem internasional modern yang berdaulat dan anarkis. Namun, selama era Republik dan awal berdirinya Republik Rakyat China (RRC), studi hubungan internasional masih

sangat terbatas dan didominasi oleh ideologi Marxis-Leninis. Dunia internasional dipahami terutama melalui lensa perjuangan kelas dan konflik antara imperialisme dan sosialisme, sehingga ruang bagi pengembangan teori HI yang otonom hampir tidak ada.

Perubahan signifikan baru terjadi setelah kebijakan reformasi dan keterbukaan yang diluncurkan pada 1978. Seiring meningkatnya keterlibatan China dalam ekonomi dan politik global, kebutuhan akan pemahaman sistematis mengenai politik internasional semakin mendesak. Shambaugh (2011) mencatat bahwa sejak 1980-an, studi HI di China berkembang pesat secara institusional, ditandai dengan pendirian puluhan program studi, lembaga riset, dan think tanks. Pada tahap awal, pengembangan disiplin ini sangat bergantung pada adopsi teori-teori Barat, terutama realisme, liberalisme, dan kemudian konstruktivisme, yang diterjemahkan dan diajarkan secara luas di universitas-universitas China.¹

Secara intelektual, evolusi teori HI di China dibentuk oleh serangkaian perdebatan yang mencerminkan perubahan posisi China dalam sistem internasional. Qin Yaqing (2011) mengidentifikasi tiga perdebatan utama sejak 1979. Perdebatan pertama berkisar pada pertanyaan mendasar mengenai karakter era internasional: apakah dunia masih berada dalam fase “perang dan revolusi” atau telah memasuki era “perdamaian dan pembangunan”. Perdebatan ini berujung pada penerimaan luas pandangan reformis bahwa stabilitas internasional relatif memungkinkan China memprioritaskan pembangunan ekonomi. Bersamaan dengan itu, muncul realisme China yang menegaskan China sebagai negara-bangsa normal dengan kepentingan nasional yang sah.²

¹ David Shambaugh, International relations studies in China: history, trends, and prospects, *International Relations of the Asia-Pacific*, Volume 11, Issue 3, September 2011, Pages 339–372, <https://doi.org/10.1093/irap/lcr013>

² Yaqing Qin, Development of International Relations theory in China: progress through debates, *International Relations of the Asia-Pacific*, Volume 11, Issue 2, May 2011, Pages 231–257, <https://doi.org/10.1093/irap/lcr003>

Perdebatan kedua, yang berkembang pada awal 1990-an, mempertemukan realisme dan liberalisme dalam merumuskan strategi pencapaian kepentingan nasional. Jika kaum realis menekankan akumulasi kekuatan nasional, kaum liberal menyoroti pentingnya institusi internasional dan interdependensi. Perdebatan ketiga muncul pada awal abad ke-21 terkait konsep kebangkitan damai China. Pada tahap ini, ketiga teori utama Barat—realisme, liberalisme, dan konstruktivisme—telah sepenuhnya masuk ke dalam diskursus akademik China. Fokus perdebatan tidak lagi semata pada strategi, tetapi pada identitas China dan relasinya dengan masyarakat internasional.

Meskipun perdebatan-perdebatan tersebut memperkuat dominasi teori Barat dalam studi HI China, secara paradoks justru membuka ruang refleksi kritis terhadap keterbatasan teori-teori tersebut. Kesadaran inilah yang kemudian mendorong pencarian kerangka teoretis alternatif yang berakar pada pengalaman historis dan tradisi intelektual China. Dengan demikian, sejarah intelektual teori HI China menunjukkan trajektori dari adopsi, internalisasi, hingga kritik terhadap teori Barat, yang menjadi fondasi bagi kemunculan teori HI China kontemporer sebagai bagian dari upaya pluralisasi teori Hubungan Internasional global.

Fondasi Filosofis Teori HI China

Salah satu ciri utama teori Hubungan Internasional (HI) China adalah rujukannya yang kuat pada filsafat klasik China, khususnya Konfusianisme. Berbeda dengan tradisi Barat yang menekankan individualisme, rasionalitas instrumental, dan asumsi aktor otonom, filsafat China memandang realitas sosial sebagai jaringan relasi yang sarat nilai moral dan diarahkan pada pencapaian harmoni. Perspektif ini membentuk fondasi ontologis dan normatif teori HI China, sekaligus membedakannya secara mendasar dari teori HI arus utama Barat.³

³ Dellios, R. (2009). International relations theory and Chinese philosophy. *East Asia Security Centre* 东亚安全中心, 1(1).

Dalam kerangka ini, konsep relationality menjadi elemen kunci. Qin Yaqing mengembangkan pendekatan relasional yang menolak pandangan bahwa kepentingan nasional bersifat tetap dan terberi. Sebaliknya, kepentingan dan identitas negara dipahami sebagai hasil dari proses interaksi sosial yang berkelanjutan. Hubungan antaraktor internasional tidak semata-mata dilihat sebagai transaksi kepentingan material, tetapi sebagai relasi sosial yang dibentuk oleh norma, kepercayaan, dan ekspektasi bersama. Ontologi relasional ini sejalan dengan pemikiran Konfusian dan dialektika yin–yang, yang menekankan dinamika, keseimbangan, dan saling ketergantungan dalam kehidupan sosial dan politik.

Selain relasionalitas, filsafat Konfusian juga menempatkan moralitas sebagai sumber legitimasi kekuasaan. Pemikiran ini tercermin dalam konsep kepemimpinan moral (moral authority), yang kemudian dikembangkan secara teoretis oleh Yan Xuetong melalui pendekatan moral realism. Berbeda dengan realisme Barat yang memisahkan kekuasaan dari etika, Yan berargumen bahwa kekuatan material yang tidak disertai kepemimpinan moral akan rapuh dan sulit dipertahankan. Dalam konteks internasional, legitimasi dan pengaruh jangka panjang justru bergantung pada kemampuan negara untuk memimpin secara etis dan memberikan manfaat nyata bagi pihak lain.

Dengan demikian, dasar filsafat teori HI China mengintegrasikan relasi, moralitas, dan harmoni sebagai elemen sentral dalam memahami politik dunia. Pendekatan ini tidak hanya menawarkan kritik terhadap reduksionisme materialis teori Barat, tetapi juga menyediakan kerangka alternatif untuk memahami kekuasaan dan tatanan internasional sebagai proses sosial yang dinamis dan bermuatan nilai.

Aliran Utama dan Kritik Teori Hubungan Internasional China

Tianxia dan Kritik sebagai Teori Hubungan Internasional China

Konsep Tianxia (segala sesuatu di bawah langit) sering dipandang sebagai inti normatif teori Hubungan Internasional (HI) China. Berakar pada filsafat politik klasik

China, Tianxia menawarkan visi tatanan dunia yang menekankan harmoni, keteraturan, dan kepemimpinan moral, sebagai alternatif atas sistem internasional modern yang dianggap anarkis dan kompetitif. Dalam diskursus teori HI China kontemporer, Tianxia kerap dipromosikan sebagai kerangka konseptual non-Barat yang mampu melampaui batas-batas negara-bangsa dan logika kepentingan sempit.

Namun, sebagaimana dikritisi oleh Sinan Chu (2020), Tianxia sebagai teori HI menghadapi persoalan epistemologis dan politis yang serius. Chu menilai bahwa banyak perumusan Tianxia modern cenderung mereproduksi pandangan dunia yang berpusat pada China, meskipun dikemas dalam bahasa universal dan kosmopolitan. Upaya untuk menjadikan Tianxia sebagai teori global sering kali tidak sepenuhnya lepas dari etnosentrisme, karena secara implisit menempatkan China sebagai pusat moral dan normatif tatanan internasional.⁴

Kritik ini menjadi lebih jelas dalam analisis Chu terhadap New Tianxia-ism yang dikembangkan Xu Jilin. Meskipun bertujuan menghindari bias etnosentris dan menampilkan Tianxia sebagai konsep inklusif, New Tianxia-ism tetap dibatasi oleh apa yang disebut Chu sebagai “subjek Sino-sentris”. Posisi subjek ini memungkinkan intelektual China membayangkan tatanan dunia alternatif, tetapi sekaligus membatasi daya kritis mereka terhadap asumsi normatif yang menguntungkan China. Akibatnya, agenda untuk membangun teori HI non-Barat yang benar-benar reflektif justru tereduksi.

Dengan demikian, Tianxia memiliki nilai penting sebagai sumber inspirasi normatif dalam teori HI China, tetapi tidak dapat diterima secara tidak kritis sebagai teori alternatif global. Sebagaimana disarankan Chu, pengembangan teori HI China ke depan memerlukan refleksi yang lebih tajam terhadap politik pengetahuan dan kecenderungan ideologis internal. Tanpa kritik semacam ini, Tianxia berisiko menjadi bukan tantangan

⁴ Chu, S. (2022). Whither Chinese IR? The Sinocentric subject and the paradox of Tianxia-ism. *International Theory*, 14(1), 57–87. doi:10.1017/S1752971920000214

terhadap dominasi teori Barat, melainkan reproduksi hierarki baru dalam bahasa yang berbeda.

Teori Moral Realism

Teori moral realism dikembangkan oleh Yan Xuetong sebagai upaya memperkaya teori Hubungan Internasional (HI) modern dengan memasukkan dimensi moral ke dalam analisis kekuasaan. Berbeda dari anggapan umum, moral realism tidak dimaksudkan sebagai teori khas China atau bagian dari “Chinese School” yang bersifat nasionalistik. Yan secara tegas menolak gagasan bahwa teori HI harus berlandaskan identitas budaya atau negara tertentu. Menurutnya, teori HI harus memiliki daya jelaskan yang bersifat universal, terlepas dari konteks asalnya.⁵

Inti argumen moral realism adalah bahwa kekuasaan material semata tidak cukup untuk menjelaskan kepemimpinan dan stabilitas dalam sistem internasional. Negara besar yang hanya mengandalkan kekuatan ekonomi dan militer, tanpa legitimasi moral, cenderung menghadapi resistensi dan instabilitas. Oleh karena itu, moral realism menekankan pentingnya kepemimpinan moral—yakni kemampuan pemimpin negara untuk bertindak konsisten, dapat dipercaya, dan memberikan manfaat bagi pihak lain. Dalam pandangan ini, moralitas bukan lawan dari realisme, melainkan sumber kekuatan strategis yang nyata.

Yan menegaskan bahwa moral realism bukan teori keistimewaan China. Teori ini menjelaskan preferensi strategis para pemimpin kekuatan besar secara umum, baik di China maupun di negara lain. Ia juga tidak mengklaim bahwa China secara inheren akan menjadi pemimpin global yang lebih bermoral dibandingkan negara besar lainnya. Dengan demikian, moral realism dibangun melalui hibridisasi pemikiran klasik China dengan teori HI modern, tanpa jatuh pada Sino-sentrisme.

⁵ Xuetong, Y. (2023). IR Moral Realism as a Universal Theory. In *The Essence of Interstate Leadership* (pp. 16-30). Bristol University Press.

Meski demikian, sebagaimana dicatat oleh Acharya, tantangan utama moral realism terletak pada pembuktian universalitasnya. Agar benar-benar berkontribusi pada Global IR, teori ini perlu diuji secara luas di luar konteks China dan dipisahkan secara jelas dari pemingkanaan kebijakan resmi negara. Tanpa upaya tersebut, moral realism berisiko dipersepsikan sebagai legitimasi normatif kebijakan kekuatan besar tertentu. Dengan pendekatan yang lebih kritis dan komparatif, moral realism tetap memiliki potensi penting sebagai jembatan antara realisme klasik dan tuntutan etika dalam politik global kontemporer.⁶

Relational Theory of World Politics

Relational Theory of World Politics yang dikembangkan oleh Qin Yaqing merupakan salah satu kontribusi paling menonjol dari teori Hubungan Internasional (HI) China terhadap pengembangan Global IR. Teori ini berangkat dari kritik terhadap teori HI arus utama Barat yang menempatkan rasionalitas individu dan aktor otonom sebagai inti analisis. Menurut Qin, asumsi tersebut mencerminkan latar budaya Barat dan tidak sepenuhnya mampu menjelaskan realitas politik internasional yang semakin kompleks dan saling terhubung. Sebagai alternatif, Qin mengajukan relationality sebagai fondasi ontologis utama, dengan memandang dunia internasional sebagai jaringan relasi yang terus bergerak, bukan sekadar kumpulan aktor yang berdiri sendiri.⁷

Dalam kerangka relasional ini, aktor internasional dipahami sebagai actors-in-relations. Kepentingan, identitas, dan perilaku negara tidak bersifat tetap, tetapi terbentuk melalui proses interaksi yang berkelanjutan. Qin menggunakan dialektika zhongyong dari filsafat China sebagai kerangka epistemologis untuk memahami relasi yang dinamis, kontekstual, dan menekankan keseimbangan. Dengan demikian,

⁶ Acharya, A. (2020). From heaven to Earth: 'Cultural idealism' and 'moral realism' as Chinese contributions to global international relations 1. In *Globalizing IR Theory* (pp. 158-185). Routledge.

⁷ Qin, Y. (2016). A relational theory of world politics. *International studies review*, 18(1), 33-47.

kekuasaan dan tata kelola global tidak lagi dipahami semata-mata sebagai hasil distribusi material, melainkan sebagai produk kualitas hubungan dan proses intersubjektif.

Namun, pendekatan ini tidak lepas dari kritik. Kavalski menyoroti bahwa meskipun relational turn—baik dalam literatur Barat maupun China—bertujuan melampaui substansialisme, upaya tersebut sering kali masih terjebak dalam dikotomi Barat versus non-Barat. Dalam konteks China, konsep guanxi kerap diposisikan sebagai ciri khas budaya yang dibedakan secara tajam dari teori Barat, sehingga justru membatasi potensi kritis dan universalitas relasionalitas itu sendiri. Kavalski berargumen bahwa relasionalitas seharusnya dipahami bukan sebagai atribut budaya tertentu, melainkan sebagai kondisi mendasar kehidupan sosial dan produksi pengetahuan global.⁸

Dengan demikian, relational theory menawarkan koreksi penting terhadap reduksionisme aktor-sentris dalam teori HI Barat, tetapi tantangan utamanya adalah menghindari jebakan kulturalisme dan eksklusivisme epistemologis. Jika dikembangkan secara reflektif dan lintas tradisi, pendekatan relasional memiliki potensi besar untuk memperkaya teori HI global tanpa menciptakan hierarki pengetahuan baru.

Kontribusi Teori HI China

Kemunculan teori Hubungan Internasional (HI) China tidak dapat dilepaskan dari perubahan struktur pengetahuan global dalam disiplin HI. Selama beberapa dekade, teori HI didominasi oleh pengalaman historis dan asumsi filosofis Barat, khususnya Eropa dan Amerika Serikat. Realisme, liberalisme, dan konstruktivisme berkembang dalam konteks sejarah Barat dan kemudian diperlakukan seolah-olah bersifat universal. Dalam konteks inilah, kontribusi teori HI China menjadi penting bukan semata-mata karena “kebaruan budaya”, melainkan karena kemampuannya menantang asumsi dasar,

⁸ Kavalski, E. (2018). Guanxi or what is the Chinese for relational theory of world politics. *International Relations of the Asia-Pacific*, 18(3), 397-420.

memperluas horizon konseptual, dan mendorong terbentuknya Global IR sebagaimana digagas oleh Amitav Acharya.

Menurut Acharya, Global IR bukanlah proyek untuk menggantikan teori Barat dengan teori non-Barat, melainkan upaya memperluas disiplin HI agar lebih inklusif, plural, dan reflektif terhadap keragaman pengalaman dunia. Dalam kerangka ini, teori HI China berkontribusi dengan menghadirkan perspektif yang selama ini terpinggirkan, terutama melalui penekanan pada relasi, sejarah panjang tatanan Asia Timur, dan peran moral dalam politik internasional. Dengan kata lain, teori HI China membantu mengoreksi kecenderungan euro-sentris dalam teori HI arus utama.⁹

Salah satu kontribusi utama teori HI China adalah kritik terhadap asumsi aktor rasional yang individualistik. Dalam banyak teori Barat, negara diperlakukan sebagai aktor otonom yang memiliki kepentingan tetap dan bertindak berdasarkan kalkulasi untung-rugi material. Teori HI China, terutama melalui pendekatan relasional, menantang pandangan ini dengan menegaskan bahwa aktor internasional selalu berada dalam jaringan hubungan sosial. Identitas dan kepentingan negara tidak bersifat given, tetapi terbentuk dan berubah melalui interaksi berkelanjutan. Kontribusi ini sejalan dengan agenda Acharya untuk memperluas ontologi dan epistemologi HI agar tidak terjebak pada satu tradisi filosofis tertentu.

Selain itu, teori HI China juga memperkaya kajian kekuasaan dan legitimasi dalam politik global. Berbeda dengan realisme yang menekankan kekuatan material, pemikiran China—yang banyak terinspirasi oleh Konfusianisme—menempatkan moralitas dan kepemimpinan etis sebagai sumber legitimasi politik. Konsep seperti moral authority dan humane authority menunjukkan bahwa kekuasaan yang berkelanjutan tidak hanya bergantung pada kemampuan memaksa, tetapi juga pada kemampuan membangun kepercayaan, memberi manfaat, dan menjaga harmoni. Dalam konteks Global IR,

⁹ Acharya, A. (2016). Advancing global IR: Challenges, contentions, and contributions. *International studies review*, 18(1), 4-15.

kontribusi ini penting karena membuka ruang bagi analisis kekuasaan yang lebih normatif dan kontekstual.

Hun Joon Kim menempatkan perkembangan teori HI China dalam konteks lokalisasi teori. Upaya membangun teori dengan “karakteristik China” bukanlah fenomena unik, melainkan bagian dari tren global untuk mendekolonisasi pengetahuan HI. Kim menekankan bahwa meskipun banyak upaya teorisasi China masih menghadapi persoalan konseptual dan metodologis, potensi jangka panjangnya sangat besar. Pertama, perkembangan teori HI China berlangsung sangat cepat dan didukung oleh komunitas akademik yang terus membesar. Kedua, kebangkitan China sebagai aktor global menciptakan interaksi yang semakin intens antara sarjana China dan Barat, sehingga membuka ruang dialog teoretis yang lebih luas.¹⁰

Dalam kerangka Acharya, kontribusi teori HI China juga terlihat dalam kemampuannya membawa kembali sejarah dan peradaban ke dalam analisis HI. Teori Barat cenderung berangkat dari pengalaman sistem Westphalia dan kolonialisme Eropa. Sebaliknya, teori HI China mengingatkan bahwa tatanan internasional tidak selalu berbentuk sistem negara-bangsa yang anarkis. Pengalaman historis Asia Timur menunjukkan adanya bentuk tatanan regional yang lebih hierarkis, berbasis relasi, dan relatif stabil dalam jangka panjang. Kontribusi ini membantu memperluas imajinasi teoretis tentang kemungkinan bentuk-bentuk tatanan internasional di luar model Barat.

Namun, baik Acharya maupun Kim sama-sama menekankan bahwa kontribusi teori HI China tidak otomatis bebas dari masalah. Salah satu tantangan utama adalah risiko etnosentrisme dan kedekatan berlebihan dengan kepentingan negara. Jika teori HI China hanya berfungsi sebagai legitimasi intelektual bagi kebijakan luar negeri China, maka kontribusinya terhadap Global IR justru menjadi terbatas. Oleh karena itu, Acharya menegaskan pentingnya menjaga jarak kritis antara teori dan kekuasaan, sementara Kim

¹⁰ Kim, H. J. (2016). Will IR theory with Chinese characteristics be a powerful alternative?. *The Chinese Journal of International Politics*, 9(1), 59-79.

mengingatkan bahwa teori dengan karakteristik lokal harus tetap terbuka terhadap dialog dan kritik lintas tradisi.

Kontribusi paling penting dari teori HI China, dengan demikian, terletak pada perannya sebagai agenda setter dalam Global IR. Ia mendorong disiplin HI untuk lebih reflektif terhadap asal-usul pengetahuannya, lebih terbuka terhadap pengalaman non-Barat, dan lebih sensitif terhadap dimensi relasional, historis, dan moral dalam politik internasional. Teori HI China tidak perlu diposisikan sebagai “alternatif tunggal” terhadap teori Barat, melainkan sebagai salah satu sumber penting dalam percakapan global tentang bagaimana dunia internasional dipahami dan dijelaskan.

Dalam konteks ini, teori HI China memperkuat argumen Acharya bahwa Global IR bukan sekadar mungkin, tetapi juga perlu. Dengan segala keterbatasannya, teori HI China telah menunjukkan bahwa teori HI dapat berkembang di luar pusat-pusat akademik Barat dan bahwa pengalaman non-Barat bukan hanya objek studi, melainkan juga sumber teori. Jika terus dikembangkan secara kritis, reflektif, dan dialogis, kontribusi teori HI China berpotensi memperkaya disiplin HI secara substantif dan menjadikannya benar-benar global.

PENUTUP

Artikel ini menunjukkan bahwa kemunculan teori Hubungan Internasional (HI) China merupakan respons intelektual terhadap keterbatasan teori HI arus utama Barat dalam menjelaskan kompleksitas politik global kontemporer. Dominasi realisme, liberalisme, dan konstruktivisme—yang berakar pada pengalaman historis dan filsafat Barat—telah lama membentuk asumsi dasar disiplin HI, terutama pandangan tentang negara sebagai aktor otonom dengan kepentingan yang relatif tetap. Dalam konteks ini, teori HI China hadir bukan sebagai pengganti teori Barat, melainkan sebagai upaya memperluas horizon konseptual dan normatif disiplin HI.

Melalui penelusuran sejarah intelektual, artikel ini menegaskan bahwa teori HI China berkembang melalui proses adopsi, internalisasi, dan kritik terhadap teori Barat.

Reformasi dan keterbukaan China sejak akhir 1970-an menciptakan ruang bagi berkembangnya studi HI secara institusional dan teoretis. Namun, justru keterlibatan intens dengan teori Barat inilah yang memunculkan kesadaran akan perlunya kerangka teoretis yang lebih sesuai dengan pengalaman historis dan tradisi intelektual China. Dalam hal ini, pemikiran Konfusian, konsep Tianxia, serta pengalaman sistem tributari menjadi sumber refleksi penting, meskipun tidak bebas dari kritik.

Kontribusi utama teori HI China terletak pada pengembangan ontologi relasional dan reintegrasi moralitas dalam analisis politik internasional. Pendekatan relasional Qin Yaqing menantang asumsi substansialis yang memandang aktor internasional sebagai entitas terpisah dan otonom. Dengan menempatkan relasi sebagai unit analisis utama, teori ini menunjukkan bahwa identitas, kepentingan, dan perilaku negara bersifat dinamis dan terbentuk melalui interaksi sosial yang berkelanjutan. Sementara itu, moral realism Yan Xuetong memperkaya perdebatan mengenai kekuasaan dengan menegaskan bahwa kepemimpinan global yang berkelanjutan memerlukan legitimasi moral, bukan sekadar keunggulan material. Kedua pendekatan ini secara eksplisit menggeser fokus analisis HI dari kalkulasi kepentingan sempit menuju kualitas hubungan dan kepemimpinan etis.

Selaras dengan kesimpulan Amitav Acharya, artikel ini menegaskan bahwa kontribusi teori HI China harus dipahami dalam kerangka Global IR. Global IR bukan proyek untuk menggantikan teori Barat dengan teori non-Barat, melainkan upaya membangun disiplin HI yang lebih inklusif, plural, dan reflektif terhadap keragaman pengalaman dunia. Dalam konteks ini, teori HI China berkontribusi dengan menghadirkan perspektif non-Barat yang menantang euro-sentrisme, memperluas ontologi dan epistemologi HI, serta mengembalikan sejarah dan peradaban ke dalam analisis politik global.

Namun, sebagaimana diingatkan oleh Hun Joon Kim, potensi teori HI China juga disertai tantangan serius. Risiko etnosentrisme, kulturalisme berlebihan, dan kedekatan

dengan agenda negara dapat membatasi daya kritis dan universalitas teori ini. Oleh karena itu, masa depan teori HI China sangat bergantung pada kemampuannya menjaga jarak kritis dari kekuasaan, membuka diri terhadap dialog lintas tradisi, serta menguji klaim-klaim teoretisnya di luar konteks China.

Dengan demikian, kesimpulan utama artikel ini adalah bahwa teori HI China memiliki kontribusi signifikan terhadap pengayaan teori HI global, bukan karena klaim keunikan budaya semata, tetapi karena kemampuannya menantang asumsi dasar disiplin dan memperluas imajinasi teoretis. Jika dikembangkan secara reflektif dan dialogis, teori HI China berpotensi menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan Global IR yang benar-benar global, plural, dan relevan dengan realitas dunia kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Liu, Siyang, Jeremy Garlick, and Fangxing Qin. "Towards Guanxi? Reconciling the 'Relational Turn' in Western and Chinese International Relations Scholarship". *All Azimuth: A Journal of Foreign Policy and Peace* 11, no. 1 (January 2022): 67-85. <https://doi.org/10.20991/allazimuth.952841>.
- Yaqing QIN, Why is there no Chinese international relations theory?, *International Relations of the Asia-Pacific*, Volume 7, Issue 3, September 2007, Pages 313–340, <https://doi.org/10.1093/irap/lcm013>
- Xinning, S. (2001). Building International Relations Theory with Chinese Characteristics. *Journal of Contemporary China*, 10(26), 61–74. <https://doi.org/10.1080/10670560125339>
- David Shambaugh, International relations studies in China: history, trends, and prospects, *International Relations of the Asia-Pacific*, Volume 11, Issue 3, September 2011, Pages 339–372, <https://doi.org/10.1093/irap/lcr013>
- Yaqing Qin, Development of International Relations theory in China: progress through debates, *International Relations of the Asia-Pacific*, Volume 11, Issue 2, May 2011, Pages 231–257, <https://doi.org/10.1093/irap/lcr003>
- Dellios, R. (2009). International relations theory and Chinese philosophy. *East Asia Security Centre 东亚安全中心*, 1(1).
- Chu, S. (2022). Whither Chinese IR? The Sinocentric subject and the paradox of Tianxia-ism. *International Theory*, 14(1), 57–87. doi:10.1017/S1752971920000214
- Xuetong, Y. (2023). IR Moral Realism as a Universal Theory. In *The Essence of Interstate Leadership* (pp. 16-30). Bristol University Press.

- Acharya, A. (2020). From heaven to Earth: 'Cultural idealism' and 'moral realism' as Chinese contributions to global international relations 1. In *Globalizing IR Theory* (pp. 158-185). Routledge.
- Qin, Y. (2016). A relational theory of world politics. *International studies review*, 18(1), 33-47.
- Kavalski, E. (2018). Guanxi or what is the Chinese for relational theory of world politics. *International Relations of the Asia-Pacific*, 18(3), 397-420.
- Acharya, A. (2016). Advancing global IR: Challenges, contentions, and contributions. *International studies review*, 18(1), 4-15.
- Kim, H. J. (2016). Will IR theory with Chinese characteristics be a powerful alternative?. *The Chinese Journal of International Politics*, 9(1), 59-79.